

DETERMINAN ANGKA PARTISIPASI MURNI: STUDI PADA PENDUDUK MISKIN TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA

Wawan Hermawan¹, Indra Maipita², Setyo Tri Wahyudi³

1. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran*

2. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan*

3. *Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya*

Email: wsetyotri@gmail.com

Abstract

One of the success of education can be seen in the development of the Pure Participation Rate (APM). Positive economic growth and a reduction in poverty levels raise questions on what factors affect the APM at the elementary, junior high and high school levels for the poor in Indonesia. The panel data model for 29 provinces and the 2011-2015 timeframe forms the basis of research data. The estimation results of the model show the coefficient of income per capita is very elastic and affects the APM for each level of education in Indonesia. Government spending on education still has the effect of increasing the APM for primary school, junior and senior high school education but has an impact that actually reduces the APM. Inequality increases the APM in Indonesia at the elementary and high school levels, whereas at the junior high level it actually lowers the APM. Finally, age at each level has an influence on middle and high school levels, but is different for elementary school levels.

Keyword: *Pure Participation Rate, Per capita income, government expenditure and Equality*

JEL Classification: I24, I25, D32

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat ditunjukkan oleh angka pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seyogyanya ditunjukkan oleh kondisi sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Namun seringkali keduanya justru menunjukkan paradoks. Oleh karena itu, fokus dari pembangunan ekonomi seharusnya diarahkan tidak hanya untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, namun juga untuk membentuk manusia sebagai sumber daya yang berkualitas serta menempatkan manusia sebagai subjek bukan sebagai objek. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Tidak hanya itu, Todaro, Michael P. Smith (2009) menyatakan bahwa tujuan mendasar dari pembangunan adalah pada pendidikan dan kesehatan manusia. Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan, karena pen-

didikan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat modal fisik, dan kemampuan menyesuaikan teknik yang diterapkan pada mesin-mesin industri (Putri & Kusren, 2017; World Bank, 1996).

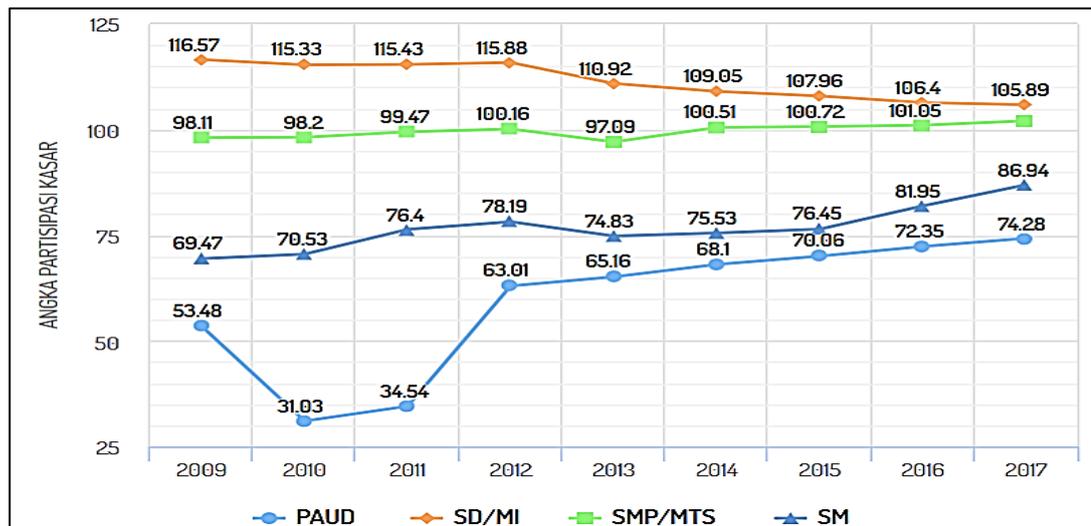
Indikator yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah tingkat partisipasi penduduk pada berbagai jenjang pendidikan (Rizqi, 2019). Semakin tinggi tingkat partisipasi dari penduduk pada semua jenjang pendidikan, diharapkan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi lebih baik. Indikator yang dapat dijadikan ukuran tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Perbedaan dari kedua indikator tersebut terletak pada penekanan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya, di mana APM menekankan pada ketepatan usia sekolah, namun tidak demikian untuk APK.

Dampak dari perbedaan ini adalah penggunaan nilai APK akan memberikan angka lebih besar dari APM. Hal tersebut terjadi karena terdapat murid yang ikut dalam salah satu jenjang pendidikan tidak termasuk pada rentang usia seharusnya.

Gambar 1 menunjukkan tingkat APK pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah (SM). Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa APK SD menunjukkan angka tertinggi dibanding jenjang lainnya, sedangkan jenjang PAUD menunjukkan angka terendah. Tingginya APK pada jenjang SD disebabkan karena jenjang SD merupakan jenjang pendidikan dasar dan bersifat wajib. Oleh karena itu, pada jenjang SD akan mudah ditemui peserta didik yang sebetulnya bukan pada rentang usia seharusnya. Dengan kata lain, pada jenjang SD, terdapat murid pada berbagai rentang usia. Kondisi berbeda ditunjukkan oleh PAUD yang memiliki APK terendah dibandingkan dengan jenjang lainnya. Hal itu terjadi karena PAUD bukan jenjang

pendidikan wajib. Meskipun PAUD merupakan jenjang pendidikan yang tidak wajib, tetapi data menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan nilai APK selama tahun 2012-2017. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya kepedulian masyarakat pada jenjang PAUD yang semakin baik.

Berbeda dengan jenjang PAUD dan SD, APK pada jenjang SMP sepanjang periode 2009-2017, menunjukkan angka APK SMP yang cenderung mengalami peningkatan meskipun relatif kecil. Meskipun demikian, adanya peningkatan APK tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan wajib belajar 9 tahun yang ditetapkan pemerintah telah membuahkan hasil yakni adanya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Selanjutnya, pada jenjang SM menunjukkan tingkat yang terus naik dengan peningkatan yang cukup berarti. Tren dari peningkatan APK SM mengarah pada tingkat APK untuk jenjang SMP dan jenjang SD, sehingga APK untuk semua jenjang diharapkan dapat mencapai 100%.



Gambar 1. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar untuk PAUD, SD/MI, SMP/MTS dan SM di Indonesia tahun 2009-2017

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data diolah (2019)

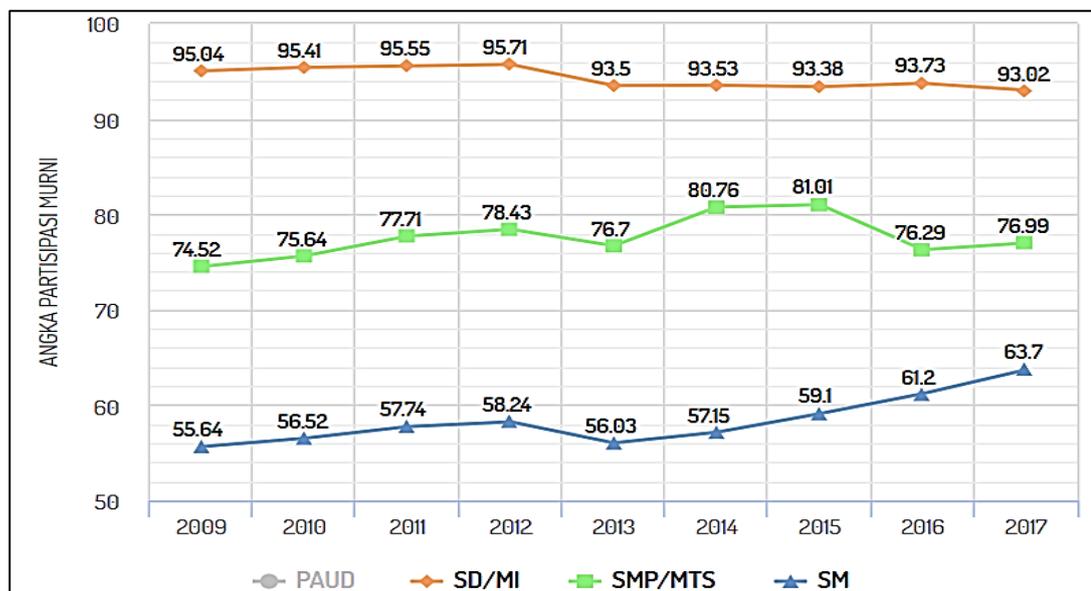
Berbeda dengan APK yang tidak menekankan pada ketepatan usia peserta didik pada jenjang pendidikan, maka

APM memberikan penekanan pada ketepatan usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu, APM

akan memberikan angka yang tidak melebihi 100%, seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Pada Gambar 2, PAUD tidak ditampilkan karena berkaitan dengan ketersediaan data. APM SD berkisar pada 93-96%, di mana tingkat dari partisipasi pada jenjang SD sudah cukup baik, walaupun ada penurunan pada tahun 2013. Jenjang SMP menunjukkan peningkatan sampai dengan tahun 2015, tetapi turun cukup jauh pada tahun 2016. Sampai dengan SMP menunjukkan tingkat keberhasilan dari program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

APM jenjang SM menunjukkan peningkatan yang cukup berarti sejak tahun 2013, walaupun masih pada tingkat 63,7% pada tahun 2017 tetapi menunjukkan tren yang cukup meningkat, sehingga harapan pada tahun-tahun berikutnya bisa terus meningkat. APM SM yang terus meningkat dapat diharapkan sebagai tonggak untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pada jenjang masuk kerja pada usia dewasa (> 16 tahun).

Peningkatan APK dan APM di Indonesia ini tidak terlepas dari berbagai kemudahan akses masyarakat terhadap pendidikan pada semua jenjang yang ada. Salah satu yang cukup penting dalam peningkatan akses tersebut adalah semakin meningkatnya daya beli masyarakat. Ukuran untuk melihat kemampuan daya beli dapat ditunjukkan dari perkembangan ekonomi di Indonesia yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang selalu positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2007-2016 cenderung melambat, walaupun masih positif. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi mencapai 5.3% dan 5% pada tahun 2016. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang diraih juga telah berhasil menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun sepanjang tahun 2007-2016. Indikator ini menunjukkan keberhasilan dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia.



Gambar 2. Perkembangan Angka Partisipasi Murni untuk PAUD, SD/MI, SMP/MTS dan SM di Indonesia tahun 2009-2017

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data diolah (2019)

Namun demikian, meskipun tingkat kemiskinan mengalami penurunan, ter-

nyata tidak diimbangi dengan indikator ketimpangan. Indeks Gini menunjuk-

kan perkembangan yang cukup tinggi di Indonesia. Sejak tahun 2011 ketimpangan memburuk sampai tahun 2013, walaupun ada penurunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang relatif rendah.

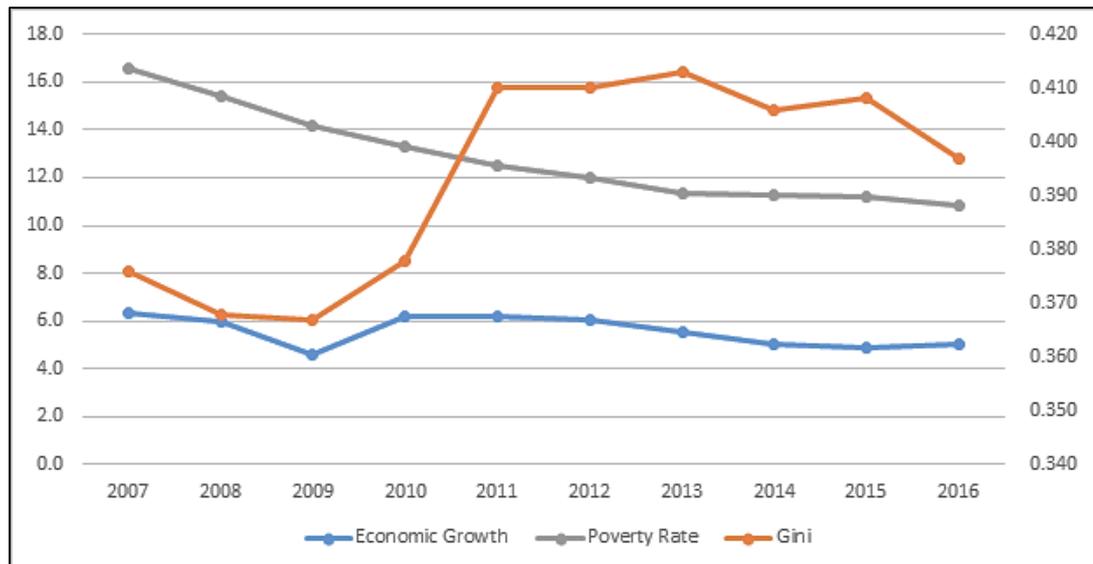
Gambar 3 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia pada tahun 2007-2016. Fenomena yang muncul pada gambar tersebut adalah adanya ketimpangan yang cukup tinggi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang masih di atas 10%, di mana garis kemiskinan per kapita per bulan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 364.527 untuk perkotaan, kemudian Rp. 343.647 untuk perdesaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi walaupun melambat di Indonesia, dan perkembangan jumlah orang miskin yang terus menurun, tetapi meningkatkan ketimpangan memberikan pertanyaan atas akses pendidikan bagi kalangan orang miskin (Yusuf, 2014). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana APM pada

setiap jenjang pendidikan untuk kelompok penduduk miskin dapat dijelaskan oleh beberapa variabel ekonomi dan pengeluaran pemerintah.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Sumber daya Manusia dan Pendidikan

Potensi pertumbuhan ekonomi pada suatu negara sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang dimilikinya, baik *human capital*, *physical capital*, maupun *resource endowment*. Harbison (1973) menyebutkan bahwa sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang pada dasarnya bersifat pasif, manusialah yang bersifat aktif; manusialah yang merupakan agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun berbagai macam organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta melaksanakan pembangunan nasional.



Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia tahun 2007-2016

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Schultz (1961) berpendapat bahwa dalam suatu masyarakat, anggotanya dapat diinvestasikan melalui pe-

ngeluaran untuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan kesehatan untuk dapat meningkatkan kapasitas produksinya.

Modal manusia memberi sumbangan besar dalam peningkatan pendapatan. Modal manusia merupakan mesin untuk pertumbuhan ekonomi (Azid & Khan, 2010). Kualitas modal manusia tergantung pada pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka kualitas atau produktivitas dari manusia itu diharapkan juga semakin tinggi. Capaian pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk pengukuran kualitas modal manusia tidak dapat dicapai dalam tingkat yang sama bagi semua masyarakat. Pendidikan yang tinggi dan kehidupan yang sehat banyak memerlukan biaya yang tinggi, sehingga tidak semua masyarakat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan secara maksimal.

Penelitian empiris yang mengaitkan antara pendidikan dan kualitas sumber daya manusia telah banyak dilakukan. Variabel yang mempengaruhi pendidikan telah banyak disampaikan oleh berbagai peneliti. Variabel pendapatan perkapita, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, total jumlah penduduk dan total urbanisasi merupakan variabel-variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pendidikan orang dewasa di negara-negara berkembang (Mazumdar, 2005). Di sisi lain, Faguet & Sánchez (2008) memberikan variabel yang lebih beragam untuk melihat pengaruh terhadap pendidikan. Variabel tersebut adalah pengeluaran perkapita untuk biaya pendidikan publik, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah, rasio guru terhadap siswa, politik, demografi rumah tangga dan status sosial ekonomi.

Selanjutnya, kondisi kemiskinan juga telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan, bukan hanya kehidupan pribadi mereka yang miskin, tetapi juga bagi orang-orang yang tidak tergolong miskin. Kemiskinan

bukan hanya menjadi beban pribadi, tetapi juga menjadi beban dan tanggung jawab masyarakat, negara dan dunia untuk mampu menanggulanginya (Maipita, 2014). Suatu cara yang diyakini sangat ampuh untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui jalur pendidikan. Bukti empiris menunjukkan bahwa peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan mengurangi ketimpangan akses tersebut menjadi penting dalam pengentasan kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh: (a) rendahnya kualitas angkatan kerja akibat rendahnya tingkat pendidikan, (b) akses yang sulit dan terbatas terhadap kepemilikan modal, (c) rendahnya tingkat penguasaan teknologi, (d) penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan (e) pertumbuhan penduduk yang tinggi (Sharp, Register, & Grimes, 2000). Hasil dari berbagai penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan per kapita dan akhirnya mengarah pada penurunan angka kemiskinan (Dollar & Kraay, 2001; Fields, 1989).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis angka partisipasi murni penduduk miskin di Indonesia untuk semua jenjang pendidikan. Data yang digunakan adalah data Susenas tahun 2011-2015. Selain itu, juga data-data ekonomi makro dan data fiskal yang didapat dari Badan Pusat Statistik serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Unit analisis dilakukan pada level provinsi. Model ekonometrika yang digunakan adalah model model data panel dengan data *time series* dari tahun 2011-2015 dan data *cross section* untuk 29 provinsi di Indonesia (Wooldridge, 2009).

Variabel utama angka partisipasi murni diadopsi dari berbagai literatur utama yang dirujuk meliputi Rajkumar

& Swaroop (2008) dan beberapa artikel pendukung lainnya seperti Anyanwu & Erhijakpor (2005); Checchi (1999); Flug, Spilimbergo, & Wachtenheim (1998); Pritchett & Filmer (1999); Psacharopoulos (1994). Selanjutnya, variabel utama diturunkan untuk masing-masing jenjang pendidikan digunakan tingkat partisipasi murni SD, SMP dan Sekolah Menengah. Sedangkan variabel independen yang dipilih berdasarkan berbagai literatur adalah Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah untuk Urusan Pendidikan, Koefisien Gini, Penduduk pada Usia SD 7-12 tahun, Penduduk pada Usia SMP 3-15 ta-

hun dan Penduduk pada Usia SMA 16-18 tahun.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan estimasi menggunakan metode panel data, diketahui bahwa *Fixed Effect Model* dengan *Estimated Generalized Least Squares* (EGLS) merupakan model terpilih. Penggunaan metode EGLS bertujuan untuk mengoreksi masalah *heteroscedasticity* atau masalah *autocorrelation*. Hasil estimasi dapat disarikan pada tabel 1 untuk semua variabel dependen, yang terdiri dari APM_SD, APM_SMP dan APM_SMA.

Tabel 1. Hasil Estimasi Menggunakan Model *Fixed Effect*

	APM_SD_Mit	APM_SMP_Mit	APM_SMA_Mit
	(5)	(6)	(7)
Konstanta	-21.9378*** (1.3995)	-19.4134*** (1.2727)	-22.3587*** (0.9029)
PKit	3.8180*** (0.1767)	3.3820*** (0.1644)	3.5781*** (0.1141)
GOV_Edit	0.0504* (0.0302)	-0.0662** (0.0304)	-0.0848*** (0.0235)
GINlit	0.8377* (0.4753)	-0.5017 (0.5378)	0.8933** (0.3786)
AGE_712it	2.1961 (3.3377)		
AGE_1315it		23.2729*** (5.0769)	
AGE_1618it			-10.8551*** (1.9658)
AR(1)	0.6454*** (0.0716)	0.3947*** (0.0749)	
AR(2)			-0.0298 (0.0388)
R2	0.9982	0.9985	0.9986
Adj R2	0.9975	0.9979	0.9977

Keterangan :

- Dalam kurung menunjukkan standar eror
- menunjukkan tingkat signifikansi pada alpha 10%
- ** menunjukkan tingkat signifikansi pada alpha 5%
- *** menunjukkan tingkat signifikansi pada alpha 1%

Berdasarkan tabel 1, variabel dari pendapatan perkapita memberikan pengaruh secara statistik pada semua tingkat pendidikan yang telah diobservasi dengan tanda yang positif. Hal ini memberikan gambaran, bahwa jika terdapat peningkatan pendapatan di kalangan penduduk miskin akan mening-

katkan partisipasi sekolah. Selanjutnya, nilai koefisien pendapatan perkapita menunjukkan angka lebih dari 3 untuk semua jenjang pendidikan, artinya bahwa elastisitas perubahan pendapatan perkapita terhadap perubahan APM sangat elastis. Jika berdasarkan kategori, elastisitas untuk jenjang SD

memiliki angka terbesar dibandingkan dengan jenjang SMP dan SMA, hal ini berarti bahwa efek perubahan pendapatan perkapita sangat dirasakan pada kategori pendidikan tingkat SD. Secara umum, dapat dikatakan bahwa variabel pendapatan perkapita memberikan peran penting dalam peningkatan partisipasi murid di Indonesia.

Secara spesifik pengaruh variabel pendapatan perkapita untuk masing-masing provinsi ditunjukkan pada

tabel 2. Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa sebagian besar provinsi menunjukkan angka elastisitas yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh yang kuat bagi penduduk miskin. Selanjutnya, tingginya elastisitas tersebut menunjukkan sensitivitas yang tinggi pada variabel pendapatan perkapita dalam mempengaruhi kenaikan partisipasi sekolah baik di tingkat SD, SMP dan SMA.

Tabel 2: Koefisien Spesifikasi Model untuk Variabel Pendapatan Perkapita

No	Provinsi	SD	SMP	SMA	RLS
1	_ACEH--PK_ACEH	10.36	9.35	0.31	-0.13
2	_SUMUT--PK_SUMUT	9.06	5.73	5.34	0.35
3	_SUMBAR--PK_SUMBAR	5.62	3.62	2.45	-0.50
4	_RIAU--PK_RIAU	5.43	4.80	5.99	0.13
5	_JAMBI--PK_JAMBI	11.03	7.38	6.98	-0.10
6	_SUMSEL--PK_SUMSEL	11.91	6.66	6.80	-0.04
7	_BENGKULU--PK_BENGKULU	16.11	15.10	12.62	0.12
8	_LAMP--PK_LAMP	9.75	5.38	6.28	2.12
9	_BABEL--PK_BABEL	3.44	3.99	0.94	-0.18
10	_JABAR--PK_JABAR	6.44	3.14	6.69	0.72
11	_JATENG--PK_JATENG	12.05	17.39	23.89	0.95
12	_YOGYA--PK_YOGYA	14.76	20.27	8.51	0.01
13	_JATIM--PK_JATIM	9.11	5.64	5.94	0.58
14	_BANTEN--PK_BANTEN	4.45	3.73	2.36	0.10
15	_BALI--PK_BALI	3.95	1.80	2.01	0.14
16	_NTB--PK_NTB	7.04	5.06	2.78	-0.10
17	_NTT--PK_NTT	9.76	5.01	5.52	-0.20
18	_KALBAR--PK_KALBAR	5.82	4.93	4.04	0.16
19	_KALTENG--PK_KALTENG	4.99	5.67	2.95	0.05
20	_KALSEL--PK_KALSEL	3.26	2.37	2.56	0.21
21	_KALTIM--PK_KALTIM	4.37	3.85	5.02	0.76
22	_KALUT--PK_KALUT	0.62	0.45	2.15	-0.02
23	_SULUT--PK_SULUT	4.66	2.77	1.66	-0.29
24	_SULTENG--PK_SULTENG	7.57	5.47	4.60	0.04
25	_SULSEL--PK_SULSEL	5.04	3.47	3.05	-0.13
26	_SULTRA--PK_SULTRA	5.97	4.93	3.68	-0.26
27	_MALUKU--PK_MALUKU	7.22	5.79	5.46	-0.37
28	_MALUT--PK_MALUT	3.02	3.29	2.94	0.04
29	_PAPUA--PK_PAPUA	3.25	1.86	1.10	0.06

Sumber: Data diolah, 2019

Variabel pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 3 menunjukkan adanya pengaruh signifikan secara statistik, untuk semua jenjang pendidikan. Namun demikian, hanya pada tingkat pendidikan SD yang memiliki nilai positif, artinya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memberi pengaruh

untuk meningkatkan partisipasi sekolah penduduk miskin. Hasil berbeda ditunjukkan untuk level SMP dan SMA yang mempunyai pengaruh negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah lebih menyentuh tingkat pendidikan menengah daripada pendidikan dasar di kalangan rakyat miskin. Selanjutnya, dampak penge-

luaran pemerintah juga dapat ditunjukkan pada tingkatan provinsi, seperti ditunjukkan oleh Tabel 3. Menurut tabel 3, dampak variabel pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang memiliki pengaruh relatif besar ditunjukkan oleh Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang mempunyai dampak positif pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap angka partisipasi murid SD dan SMP dan serta SMA.

Terakhir, peran variabel ketimpangan pendapatan terhadap tingkat partisipasi sekolah pada berbagai jenjang pendidikan ditunjukkan oleh tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa ketimpangan pendapatan memberikan pengaruh signifikan ditunjukkan oleh jenjang pendidikan SD dan SMA, sedangkan untuk jenjang SMP, ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh secara statistik terhadap tingkat partisipasi sekolah penduduk miskin.

Tabel 3. Koefisien Spesifikasi Model untuk Pengeluaran Pemerintah

No	Provinsi	SD	SMP	SMA	RLS
1	_ACEH--GOV_ED_ACEH	-0.06	0.48	0.47	0.00
2	_SUMUT--GOV_ED_SUMUT	1.09	0.22	-0.36	-0.10
3	_SUMBAR--GOV_ED_SUMBAR	-0.22	0.13	0.09	0.08
4	_RIAU--GOV_ED_RIAU	-1.86	-1.45	-1.94	0.11
5	_JAMBI--GOV_ED_JAMBI	1.45	1.44	1.78	-0.04
6	_SUMSEL--GOV_ED_SUMSEL	1.00	0.34	-1.01	-0.01
7	_BENGKULU--GOV_ED_BENGKULU	1.80	2.65	1.59	-0.01
8	_LAMP--GOV_ED_LAMP	-2.39	0.82	0.13	0.36
9	_BABEL--GOV_ED_BABEL	0.02	0.09	0.38	0.03
10	_JABAR--GOV_ED_JABAR	-0.08	-0.70	-0.66	-0.20
11	_JATENG--GOV_ED_JATENG	0.25	-0.91	-1.27	-0.11
12	_YOGYA--GOV_ED_YOGYA	-0.71	-1.93	-1.06	0.02
13	_JATIM--GOV_ED_JATIM	0.48	-0.75	-0.99	-0.25
14	_BANTEN--GOV_ED_BANTEN	0.26	0.05	0.04	-0.06
15	_BALI--GOV_ED_BALI	0.07	0.01	0.08	-0.03
16	_NTB--GOV_ED_NTB	0.54	0.20	-0.11	-0.02
17	_NTT--GOV_ED_NTT	0.20	-0.05	-0.07	-0.01
18	_KALBAR--GOV_ED_KALBAR	-0.71	-1.31	-0.30	-0.28
19	_KALTENG--GOV_ED_KALTENG	0.14	0.49	0.10	0.03
20	_KALSEL--GOV_ED_KALSEL	0.07	0.07	-0.45	0.05
21	_KALTIM--GOV_ED_KALTIM	-0.14	-0.22	-0.28	0.06
22	_KALUT--GOV_ED_KALUT	0.09	0.12	0.07	0.00
23	_SULUT--GOV_ED_SULUT	-0.11	-0.68	-0.52	0.08
24	_SULTENG--GOV_ED_SULTENG	-0.83	-1.56	-1.36	0.07
25	_SULSEL--GOV_ED_SULSEL	0.12	-0.28	0.12	-0.01
26	_SULTRA--GOV_ED_SULTRA	-0.62	-0.62	-0.32	0.01
27	_MALUKU--GOV_ED_MALUKU	-0.10	-0.23	-0.23	0.00
28	_MALUT--GOV_ED_MALUT	-0.05	0.02	-0.11	0.00
29	_PAPUA--GOV_ED_PAPUA	-0.50	-2.25	-3.82	0.18

Sumber: Data diolah, 2019

Peningkatan ketimpangan yang dimaksud adalah adanya ketimpangan pendapatan antara individu kaya dan miskin. Di sisi lain, semakin meningkatnya pendapatan orang kaya, meskipun memberikan dampak meningkatnya ketimpangan, namun peningkatan pendapatan orang kaya dapat menambah tingkat pendapatan pajak pemerin-

tah yang kemudian dapat digunakan untuk mendorong tingkat partisipasi murid di kalangan rakyat miskin. Artinya terdapat subsidi silang antara si kaya dengan si miskin.

Selanjutnya, berdasarkan tabel 4 juga dapat dikatakan bahwa usia pada level SD tidak memberikan pengaruh pada tingkat partisipasi sekolah pendu-

duk miskin. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi adanya tingkat APM yang relatif tinggi sebagai akibat dari kebijakan wajib belajar dan sekolah gratis yang diterapkan pada tingkat SD dan SMP. Bahkan pendidikan tingkat Sekolah Dasar sudah menjadi kebutuhan bagi semua orang di Indonesia. Hal ini tercermin pada APK yang lebih dari 100%, di mana kesadaran untuk masuk jenjang pendidikan SD sudah begitu disadari. Angka APK yang tinggi ini memberikan gambaran atas kesadaran

masuk sekolah baik pada usia SD (7-12 tahun), dan di luar usia sekolah SD.

Level SMP dan SMA usia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi sekolah pada penduduk miskin. Pada level SMP peningkatan jumlah usia SMP akan meningkatkan partisipasi sekolah SMP, sedangkan untuk level SMA peningkatan jumlah usia SMA akan menurunkan partisipasi sekolah SMA pada penduduk miskin.

Tabel 4. Spesifikasi model untuk Variabel Ketimpangan Pendapatan

No	Provinsi	SD	SMP	SMA	RLS
1	_ACEH--GINI_ACEH	33.17	30.15	130.37	1.91
2	_SUMUT--GINI_SUMUT	12.64	-0.58	2.63	0.80
3	_SUMBAR--GINI_SUMBAR	7.14	-0.73	-1.80	-1.15
4	_RIAU--GINI_RIAU	-6.58	-11.41	-7.41	0.15
5	_JAMBI--GINI_JAMBI	3.04	3.80	48.24	-1.00
6	_SUMSEL--GINI_SUMSEL	-10.66	-7.88	-7.64	-0.22
7	_BENGKULU--GINI_BENGKULU	-27.46	-38.73	-71.14	-0.10
8	_LAMP--GINI_LAMP	4.88	-1.69	-7.96	1.06
9	_BABEL--GINI_BABEL	1.23	-7.20	-8.81	-0.88
10	_JABAR--GINI_JABAR	-3.37	-1.80	-2.09	1.13
11	_JATENG--GINI_JATENG	37.58	14.56	-6.09	2.06
12	_YOGYA--GINI_YOGYA	2.27	-3.19	30.28	-0.38
13	_JATIM--GINI_JATIM	-1.56	4.02	8.12	1.38
14	_BANTEN--GINI_BANTEN	-0.47	-0.38	0.16	0.36
15	_BALI--GINI_BALI	1.72	2.57	4.31	0.19
16	_NTB--GINI_NTB	-16.68	-17.78	2.41	0.57
17	_NTT--GINI_NTT	-12.71	-13.56	-4.61	2.29
18	_KALBAR--GINI_KALBAR	1.24	0.23	2.27	-0.25
19	_KALTENG--GINI_KALTENG	1.91	1.52	0.87	-0.02
20	_KALSEL--GINI_KALSEL	0.85	-1.74	8.18	-1.26
21	_KALTIM--GINI_KALTIM	-1.96	-1.68	-3.39	0.24
22	_KALUT--GINI_KALUT	-2.26	-5.47	10.96	0.04
23	_SULUT--GINI_SULUT	1.89	0.28	0.62	0.08
24	_SULTENG--GINI_SULTENG	-10.63	-19.14	-12.80	-0.93
25	_SULSEL--GINI_SULSEL	6.33	2.84	0.12	0.23
26	_SULTRA--GINI_SULTRA	-2.08	-9.90	1.85	4.47
27	_MALUKU--GINI_MALUKU	11.98	5.49	-8.63	-1.45
28	_MALUT--GINI_MALUT	-1.89	3.82	-0.06	-0.83
29	_PAPUA--GINI_PAPUA	2.60	3.01	-3.17	0.24

Sumber: Data diolah, 2019

Hal ini menunjukkan level SMA masih kecil dari kalangan rakyat miskin, sehingga walaupun usia SMA bertambah, tetapi tidak digunakan untuk masuk pendidikan SMA. Substitusi untuk masuk jenjang SMA pada pengeluaran lain yang dilakukan oleh kalangan miskin, karena level SMA yang masih berbiaya relatif tinggi bagi orang miskin.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN

Berdasarkan hasil pengujian model dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal penting yakni (i) Pendapatan perkapita merupakan variabel penting dalam peningkatan APM di Indonesia. Angka koefisien pendapatan

perkapita yang sangat elastis, memberikan gambaran efektivitas dari peningkatan pendapatan perkapita dapat meningkatkan APM untuk setiap jenjang pendidikan di Indonesia. (ii) Pengeluaran pemerintah untuk urusan pendidikan masih mempunyai efek meningkatkan APM untuk jenjang pendidikan SD, pendidikan SMP dan SMA mempunyai dampak yang justru menurunkan APM. (iii) Ketimpangan meningkatkan APM di Indonesia pada jenjang pendidikan SD dan SMA, sedangkan pada jenjang SMP malah menurunkan APM. Serta (iv) usia pada masing-masing jenjang berpengaruh pada jenjang SMP dan SMA, untuk jenjang SD tidak berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anyanwu, J., & Erhijakpor, A. (2005). *Education Expenditures and School Enrolment in Africa: Illustrations from Nigeria and Other SANE Countries* (No. Economic Reserch Working Paper No 92).
- Azid, T., & Khan, R. E. A. (2010). Who Are the Children Going to School in Urban Punjab (Pakistan)? *International Journal of Social Economics*, 37(6), 442–465.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/03068291011042328>
- Checchi, D. (1999). *Inequality in Incomes and Access to Education. A Cross-Country Analysis (1960-95)* (No. Development Working Papers 125).
- Dollar, D., & Kraay, A. (2001). *Growth is Good for the Poor* (No. World Bank Policy Research Working Paper 2587). Washington DC.
- Faguet, J.-P., & Sánchez, F. (2008). Decentralization's Effects on Educational Outcomes in Bolivia and Colombia. *World Development*, 36(7), 1294–1316.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.06.021>
- Fields, G. S. (1989). Changes in Poverty and Inequality in Developing Countries. *World Bank Research Observer*, 4(2), 167–185.
- Flug, K., Spilimbergo, A., & Wachtenheim, E. (1998). Investment in Education: Do Economic Volatility and Credit Constraints Matter? *Journal of Development Economics*, 55(2), 465–481.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(98\)00045-5](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-3878(98)00045-5)
- Harbison, F. H. (1973). *Human Resources as the Wealth of Nations*. New York: Oxford University Press.
- Maipita, I. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mazumdar, K. (2005). Socio-Economic Factors Determining Adult Literacy in Developing Countries. *International Journal of Social Economics*, 32(1/2), 98–120.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/03068290510575667>
- Pritchett, L., & Filmer, D. (1999). What Education Production Functions Really Show: A Positive Theory of Education Expenditures. *Economics of Education Review*, 18(2), 223–239.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0272-7757\(98\)00034-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0272-7757(98)00034-X)
- Psacharopoulos, G. (1994). Returns to Investment in Education: A Global Update. *World Development*, 22(9), 1325–1343.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90007-8](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90007-8)
- Putri, Y. A. K. D., & Kusren, S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan, Tingkat Pendidikan,

- dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 17(2), 67–77.
- Rajkumar, A. S., & Swaroop, V. (2008). Public Spending and Outcomes: Does Governance Matter? *Journal of Development Economics*, 86(1), 96–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.08.003>
- Rizqi, U. A. A. (2019). Aplikasi Regresi Spasial untuk Menganalisis Pengaruh Indikator Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 19(2), 139–148.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Retrieved from www.jstor.org/stable/1818907
- Sharp, A. M., Register, C. A., & Grimes, P. W. (2000). *Economics of Social Issues* (14th ed.). New York: Irwin/McGraw-Hill.
- Todaro, Michael P. Smith, S. C. (2009). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Wooldridge, J. M. (2009). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. Canada: South-Western.
- World Bank. (1996). *World Development Report: From Plant to Market*. World Bank Publications.
- Yusuf, A. A. (2014). *Has Prosperity Been For All? Revisiting The Trend Of Various Dimensions Of Inequality In Indonesia*. Jakarta: INFID.